Problem-problem Internal Kita Dalam Kacamata Sistem Islam

SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN 1

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu." (AI-Maidah: 49)

Pemerintahan Dalam Islam

Islam yang hanif ini mengharuskan pemerintahannya tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia. la tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah saw. bersabda kepada sebagian sahabatnya,

“Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu."

Pada hadits yang lain beliau juga bersabda kepada para sahabat,

"Dan jika kalian bertiga, maka hendaklah salah seorang (di antara kalian) memimpin."

Barangsiapa beranggapan bahwa agama —terlebih lagi Islam— tidak mengungkap masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, maka sungguh ia telah menganiaya diri sendiri dan pengetahuannya. Saya tidak mengatakan bahwa ia "menganiaya Islam", karena Islam itu sya-ri'at Allah yang sama sekali tidak mengandung kebatilan, baik di depan maupun di belakangnya.

Sungguh indah kata-kata Imam Al-Ghazali, "Ketahuilah bahwa syari'at itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang."

Daulah islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung suatu misi, bukan sekedar

bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan; yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya.

Merupakan kesalahan yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini, sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan agama dari urusan politik (meski secara teoritis kita mengingkan pemisahan seperti ini), Kita tetapkan dalam UUD kita bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun ternyata ketetapan ini tidak cukup bisa menghalangi para petinggi pemerintahan dan para tokoh politik untuk merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak, serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan.

Tiang-tiang Penyangga Pemerintahan Islam

pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah populer dan baku. Kaidah-kaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. la tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah, kesatuan m.asyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.

Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat adalah tuannya. Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang digembalakan."

Ketika Abu Bakar ra. diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke atas mimbar seraya berkata, "Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari Baitul Maal kalian."

Dengan penjelasan ini beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan paling adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahkan,

beliau telah meletakkan dasar-dasarnya, bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak dan kewajibannya serta memelihara kepentingan bersama. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya, maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya, maka baginya sudah ditetapkan sanksi hukuman.

Kesatuan Umat

Umat Islam adalah umat yang satu, karena ukhuwah —yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka— adalah salah satu landasan iman. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwah, dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasehat dari yang kecil kepada yang besar, atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam, yakni memberi nasehat, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Rasulullah saw. bersabda,

"Agama itu nasehat." Mereka berkata, "Bagi siapa wahai Rasul Allah?" Rasulullah menjawab, "Bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kalangan umum mereka."

Rasulullah juga bersabda,

"Jika aku melihat umatku takut berkata kepada orang yang berbuat zhalim (dengan perkataan), 'Wahai si Zhalim', maka ia telah keluar dari kelompok mereka."

Penghulu para syuhada' adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah (berbuat ma'ruf) dan melarangnya (dari perbuatan munkar), kemudian ia dibunuh."

Di kalangan umat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain, karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu, yakni Al-Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Sementara itu, perbedaan dalam hal-hal ***furu'*** (cabang) tidaklah membahayakan; tidak akan mengakibatkan kebencian, permusuhan, dan fanatisme golongan.

Meskipun demikian, diperlukan adanya penelitian dan kajian, musyawarah, dan saling menasehati. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad

terhadapnya. Sedangkan yang tidak ada, maka kepala negaralah yang memutuskan agar umat tetap bersatu dengannya. Dan tidak ada lagi yang lain sesudah itu.

Menghargai Aspirasi Rakyat

Di antara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan menasehatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah swt. telah memerintahkan kepada para kepala pemerintahan agar melakukan hal itu.

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran: 159)

Bahkan, Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut.

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (Asy-Syura: 38)

Masalah ini juga ditegaskan dalam Sunah Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin,

"Jika datang kepada mereka suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. Kemudian mereka saling bermusyawarah dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Bahkan, para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) kepada pendapat yang benar tadi."

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata,

"Jika kalian melihat aku di atas kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah."

Umar bin Khathab berkata,

"Barangsiapa melihat dalam diriku sesuatu yang bengkok, maka luruskanlah."

Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata, selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (di mana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan

diterapkan secara tepat hingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian yang lain). Keseimbangan ini tidak mungkin bisa terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Dengan memelihara dan menjaganya akan tergapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Inilah yang dalam istilah politik modern kita kenal sebagai kesadaran politik, atau kematangan politik, atau pendidikan politik, atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakekat: keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Teks-teks ajaran saja tidaklah cukup untuk membangkitkan umat. Demikian juga, sebuah undang-undang tak akan berguna jika tidak ada seorang hakim —yang adil dan bersih— yang memelopori penerapannya.

Dalam kehidupan modern ini kita telah mengadopsi sistem parlemen dari Eropa, yang di bawah naungannya pemerintahan kita ditegakkan. Di atas pondasinya, kita membangun sistem perundang-undangan, bahkan sistem ini pernah berganti nama dengan nama ala mereka. Kita juga sudah terlalu sering merasakan akibat-akibatnya. Maka kita patut bertanya, sejauh manakah kesesuaiannya dengan Islam? Dan sejauh manakah manfaat yang bisa kita petik darinya selama ini?

Itulah yang akan kami bahas di sini, insya Allah.

SISTEM PEMERINTAHAN 2

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 50)

Dalam pembahasan yang lalu saya sudah mengemukakan bahwa tiang-tiang penyangga (yang tegak di atasnya) sistem pemerintahan Islam itu ada tiga:

1. Tanggung jawab pemerintah,
2. Kesatuan umat, dan
3. Penghargaan terhadap aspirasi umat.

Sistem ini telah terwujud dengan sempurna pada masa Khulafaur Rasyidin. Mereka (para khalifah) ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengemban amanah yang dipikulkan di atas pundak mereka sebagai pemimpin. Hal ini dibuktikan

dalam setiap ucapan dan perilaku. Cukuplah bagi anda untuk membaca apa yang dikatakan oleh Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz ketika keduanya diangkat menjadi khalifah. Sejarah kepemimpinan mereka pun senantiasa sesuai dengan apa yang mereka berdua katakan.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat untuk menjadi pemimpin kalian. Kalau bukan karena aku diharap untuk menjadi yang terbaik di antara kalian, yang paling kuat untuk bisa mengurusi kalian, dan paling sensitif untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara penting kalian, tentu aku tidak akan mau menjadi pemimpin di antara kalian. Cukuplah tugas Umar ini begitu menyedihkan, sambil menanti detik-detik hari perhitungan. Dia mengambil dan meletakkan hak-hak kalian sebagaimana yang ia telah lakukan dan ia hidup bersama kalian sebagaimana ia telah lakukan. Sungguh, Tuhankulah Dzat yang berhak dimintai pertolongan."

Umar merasa tidak mempunyai kekuatan kecuali jika ada rahmat, pertolongan, dan dukungan dari Allah. Berkenaan dengan besarnya rasa Tanggung jawab sebagai pemimpin, beliau berkata,

"Seandainya ada onta yang hilang di dekat sungai Eufrat, sungguh saya khawatir jangan-jangan keluarga Khathab yang akan dimintai pertangungjawaban."

Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah khutbahnya mengatakan,

"Amma ba'du, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelah nabi kalian, Muhammad saw, Tidak ada kitab yang akan diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada beliau. Ingatlah bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah itu akan tetap halal sampai hari kiamat dan apa yang diharamkan oleh Allah akan tetap haram sampai hari kiamat. Aku bukanlah seorang hakim, tapi aku adalah seorang penyeru kepada keselamatan. Aku bukanlah seorang mubtadi' (pembuat bid'ah) tapi aku adalah seorang muttabi' (yang beritiba' kepada Rasul). Tidak ada seorang pun yang boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, tetapi aku adalah salah seorang di antara kalian, hanya saja Allah telah menjadikan aku sebagai orang yang paling berat dalam menanggung beban daripada kalian."

Tampuk kekhilafahan diserahkan kepada beliau setelah pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik (khalifah sebelumnya). Namun, beliau meminta untuk ditunda. Beliau kemudian menaiki kudanya dan kembali ke rumah. Salah seorang pelayannya yang bernama Muzahim masuk ke rumah seraya berkata, "Wahai Amirul mukminin, kelihatannya ada yang penting?" Beliau menjawab, "Perkara yang menimpaku saat inilah yang kuanggap sangat penting. Sesungguhnya, tidak ada satu pun umat Muhammad di barat maupun di timur kecuali punya hak yang aku harus menunaikannya, meski ia tidak menuliskan atau memintanya kepadaku (untuk melaksanakannya)."

Dulu umat bersatu dalam kata dengan berpegang teguh kepada tali-tali agama, yakin akan keutamaan hukum-hukumnya, memelihara perintah Rasulullah saw., dan peringatan keras beliau untuk menjaga persatuan. Demikian pentingnya arti jamaah dan persatuan di bawah naungannya, sampai-sampai Rasul memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah dan keluar dari ketaatan. Beliau bersabda,

"Barangsiapa yang datang kepada kalian —sementara kalian sudah bersatu— untuk memecah-belah kekuatan kalian, maka penggallah ia dengan pedang, bagaimana pun keadaannya."

Sebagaimana beliau juga bersabda,

"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan menentang jamaah, kemudian ia meninggal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan barangsiapa yang berperang di bawah bendera ashabiyah, marah karena ashabiyah, menyeru kepada ashabiyah, atau menghidupkan ashabiyah, kemudian ia terbunuh, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Barangsiapa keluar dari umatku, mencela yang baik maupun yang buruknya, tidak mau berhati-hati terhadap orang mukmin, dan tidak menepati janji, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku pun bukan bagian dari dirinya."

Demikian juga aspirasi dan kehendak rakyat, ia merupakan sesuatu yang sangat dihormati dan dihargai. Abu Bakar tidak memutuskan satu keputusan pun bagi rakyatnya, kecuali setelah bermusyawarah dengan mereka, terutamanya dalam hal yang tidak ada nash hukumnya. Demikian pula Umar bin Khathab. Untuk menduduki posisi khalifah setelahnya, beliau menunjuk enam orang —yang Rasulullah ridha kepadanya sampai akhir hayatnya— untuk bermusyawarah.

Telah saya katakan di muka bahwa kita telah mengadopsi sistem parlemen dari Eropa dan menjadikannya sebagai pijakan pemerintahan kita. Maka, sejauh manakah kesesuaiannya terhadap Islam? Manfaat apa yang bisa kita peroleh darinya semenjak kita terapkan di negeri kita beberapa dekade terakhir ini, selaraa kurang lebih seperempat abad?

Sikap Islam Terhadap Sistem Perwakilan dan Undang-undang Dasar Mesir

Seorang pakar hukum perundang-undangan mengatakan bahwa sesungguhnya sistem perwakilan. itu ditegakkan di atas pondasi tanggung jawab pemerintah, kedaulatan rakyat, dan penghargaan terhadap aspirasi mereka. Dalam sistem parlementer tidak ada yang yang menghalangi persatuan dan kesatuan umat. Perpecahan dan perbedaan pun bukan termasuk syarat tegaknya, kendati sebagian dari mereka mengatakan bahwa salah satu tiang penyangga sistem parlementer adalah sistem kepartaian. Akan tetapi, kalau pun ini telah menjadi tradisi, sesungguhnya ia bukan merupakan pondasi bagi tegaknya sistem ini. Karena, sangat mungkin sistem parlemen dipraktekkan tanpa adanya partai, dan tanpa keluar dari kaidah-kaidah aslinya.

Atas dasar ini, tidak ada kaidah-kaidah sistem parlemen yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh Islam dalam menata pemerintahan. Dengan demikian, berarti sistem parlemen tidak jauh melenceng dan tidak asing bagi sistem Islam. Dengan demikian pula dapat kita katakan dengan mantap bahwa kaidah-kaidah dasar yang menjadi tumpuan tegaknya UUD Mesir tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, serta tidak jauh dan tidak asing baginya. Bahkan, para tokoh yang menciptakan UUD Mesir —meski dengan bersandar kepada prinsip-prinsip kontemporer dan teori perundang-undangan mutakhir— telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada satu butir pun dari undang-undang tersebut yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Ada yang secarategas dicantumkan, sebagaimana dikatakan dalam salah satu butir undang-undang bahwa, *"**Agama resmi negara adalah Islam** "*, Ada pula yang secara tersirat mencantumkan kata-kata Islam, namun dijamin tidak bertentangan dengan aturan Islam, seperti butir undang-undang yang berbunyi, ***"Kebebasan berkeyakinan itu dijamin."***

Namun, di sini saya ingin menegaskan bahwa ada perbedaan antara UUD Mesir sebagai sesuatu yang ideal, dengan undang-undang yang digunakan sebagai pijakan dalam sistem peradilan dalam prakteknya. Banyak dari undang undang yang menjadi pijakan peradilan ini secara terang-terangan bertentangan dengan Islam. Untuk hal yang satu ini perlu ada pembahasan lain yang akan kita kemukakan pada waktunya nanti, insya Allah.

Kendati kaidah-kaidah dasar dari sistem parlemen dan UUD Mesir tidak bertentangan dengan apa yang digariskan Islam dalam sistem pemerintahan, namun kami katakan terus-terang bahwa di sana masih banyak terdapat cacat, baik pada redaksionalnya maupun dalam prakteknya. Selain itu, juga terdapat cacat dalam hal menjaga keterkaitan antara kaidah-kaidah dasar Islam dengan pinsip-prinsip yang mendasari UU tersebut. Semuanya itu mengakibatkan munculnya berbagai kerusakan dan ketidakpastian yang melanda semua aspek kehidupan parlemen, sebagaimana yang selama ini kita keluhkan.

Ringkasan kesimpulan tadi akan sedikit kita bahas dalam Penjelasan berikut.

Tanggung Jawab Pemerintah (Kabinet)

Perihal tanggung jawab pemerintah menurut sistem Islam, pada dasarnya yang memiliki adalah presiden (kepala pemerimahan), betapa pun keadaannya. Dia punya hak untuk melakukan apa saja untuk kemudian menyerahkan penilaian perilakunya kepada masyarakat. Jika ia baik, rakyat wajib mendukungnya, Namun sebaliknya, jika ia tidak baik, maka rakyat harus meluruskannya. Islam tidak melarang seorang presiden melimpahkan wewenang eksekutifnya kepada yang lain untuk mengemban tanggung jawab ini, sebagaimana dalam pemerintahan Islam masa lalu dikenal dengan ***"wizaratut tafwidh"*** (maksudnya kurang lebih sama- dengan sistem kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sekarang ini). Para ulama fiqih telah memberi dispensasi atas masalah ini dan membolehkannya sepanjang tetap dalam kerangka menegakkan maslahat.

Dalam Kitab ***Al-Ahkam As-Sulthaniyah***, Imam Al-Mawardi mengatakan, "Kabinet itu ada dua: kabinet parlementer dan kabinet presidensil. Kabinet parlementer adalah sebuah sistem kabinet yang seorang kepala negara menyerahkan pengendalian urusan negara kepada orang lain sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Tidak ada

larangan untuk memberlakukan sistem kabinet seperti ini. Ketika berkisah tentang Nabi Musa as., Allah berfirman,

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu (menteri) dari keluargaku, (yaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." (Thaha: 29-32)

]ika dalam kenabian saja hal itu dibolehkan, maka dalam pemerintahan tentu lebih boleh lagi hukumnya. Karena, apa yang diserahkan kepada sang Imam —untuk menjalankan kekuasaan ekskutif— tidak akan mampu dilaksanakan kecuali dengan perwakilan. Mewakilkan kepada menteri yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan Itu lebih pas (kepada kebenaran pelaksanaan program pemerintahan) daripada dia sendiri yang melaksanakannya, selain untuk mencegah dominasi dirinya atas yang lain. Dengan demikian, kesalahan, cacat, dan cela akan dapat dihindari.

Memang, pada dasarnya fungsi kepemimpinan dalam sistem parlementer secara tidak langsung dipegang oleh kabinet dan bukan kepala negara, Kondisi seperti ini sebagaimana tertera dalam UUD Mesir dan sistem pemerintahan Inggris. Keduanya secara tegas telah menyatakan akan adanya kepemimpinan kabinet (perdana menteri) dan membebastugaskan raja dari semua Tanggung jawab, dengan anggapan bahwa seorang raja tidak pernah bersalah dan keberadaannya terlindungi serta tak tersentuh.

Pada saat yang sama, sistem parlementer ini tidak menghalangi kepala negara untuk mengemban langsung tanggung jawab kekuasaan ekskutif. Pada posisi ini kabinet berfungsi sebagai pelengkap, sebagaimana diterapkan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Uniknya, buku-buku fiqih Islam ternyata telah menyinggung masalah ini dengan apa yang dinamakan kabinet presidensil. Dalam kitabnya ***Al-Ahkam As-Sulthaniyah*** Imam Al-Mawardi berkata, "Sedangkan kabinet presidensil, maka hukumnya lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih sedikit. Hal ini karena pandangan terbatas pada pendapat pemimpin dan pengendalian yang dilakukannya. Menteri dalam kabinet ini menjadi pembantu bagi presiden dalam menunaikan amanah kekuasaan. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan, merealiasikan apa yang dicanangkan, dan menjalankan apa yang ditetapkan."

Tidak bisa dipungkiri, inilah bukti akan keluasan dan keluwesan materi fiqih Islam serta kelayakannya untuk diterapkan di setiap ruang dan waktu.

Kerancuan Undang-undang Dasar Mesir

Itulah kaidah-kaidah Islam -dan sekaligus sistem parlementer- dalam hal tanggung jawab pemerintah. Lantas apa yang telah kita lakukan di Mesir? Kita berada di persimpangan jalan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam kaitan ini UUD kita rancu, tidak jelas, dan tidak rinci. Padahal, ia merupakan perangkat terpenting untuk menentukan corak kehidupan parlemen dan pemerintahan yang islami.

Untuk penjelasan lebih jauh, saya kutipkan tulisan yang disusun oleh dua orang ustadz, yakni: Dr, Ibrahim Madkur (anggota Majelis Ulama Mesir) dan Murait Ghali, dalam sebuah diktat mereka yang berjudul ***Sistem Baru***. Pada tajuk yang berjudul ***Undang-undang Dasar dan Kerancuannya*** beliau berdua mengatakan, "Adapun faktor pertama, secara ringkas adalah bahwa UUD kita ini meskipun rinci dan tepat redaksinya ternyata banyak terjebak dalam kerancuan, sebagaimana yang terjadi pada Undang-undang Dasar sebelumnya."

la meninggalkan butir terpenting tentang peraturan sistem parlementer, tanpa memberi penjelasan yang cukup. Yang kami maksudkan adalah tentang batas wewenang dan kekuasaan para menteri serta hubungan mereka dengan rakyat di satu sisi, dan tugas mereka dalam membimbing rakyat untuk melaksanakan berbagai pengabdian dalam bidang kesejahteraan umum dan administrasi pada sisi yang lain. UUD itu juga telah mengungkap secara global sikap para menteri terhadap pemimpin negara atau raja, dengan redaksional yang masih mungkin ditafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Sebagaimana dimaklumi, kabinet adalah tulang punggung dalam struktur sistem parlemen secara keseluruhan. la merupakan penghubung antara pembuatan peraturan dan penerapannya. la merupakan pembangkit kehidupan dan dinamika dalam sistem yang menghargai aspirasi kedaulatan rakyat beserta pengelolaan urusan negara dengan cara yang tepat dan cepat. Jika kita kembali kepada UUD, maka penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan sensitif ini kita dapati hanya tiga baris, yang semuanya global dan rancu.

Pada pasal 29 disebutkan, "Bahwa kekuasan eksekutif ada di tangan raja dalam batas-batas perundang-undangan." Pada pasal 48 disebutkan, "Raja melaksanakan kekuasaannya dengan perantaraan para menterinya." Sementara pada pasal 49 disebutkan, "Raja berhak mengangkat dan memecat para menterinya."' Dan pada pasal 57 disebutkan, "Dewan Menteri adalah penguasa kepentingan-kepentingan negara." Pada pasal 61, "Perdana Menteri bertanggung jawab kepada legislatif tentang politik umum negara, dan setiap mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan program departemennya." Dan pada pasal 63, "Titah raja, baik lisan maupun tertulis tidak bisa melepaskan Tanggung jawab daripara menteri, bagaimana pun keadaannya."

Kurang lebih itulah poin-poin yang terkait dengan tema ini. Kita pun tidak yakin bahwa dalam poin-poin tersebut ada peraturan-peraturan yang cukup untuk memecahkan berbagai problem yang kita paparkan tadi.

Setelah itu, kedua pakar tadi melanjutkan penjelasan dan contoh yang merinci keterangan yang telah diungkapkan tadi. Yang penting, bahwa tema ini —yang merupakan inti permasalahan— membutuhkan penjelaskan hingga memuaskan. Dan ini merupakan kaidah pertama dari kaidah-kaidah sistem Islam atau sistem parlementer. Tanpa semua itu, persoalan tidak mungkin bisa jernih dan lurus.

SISTEM PEMERINTAHAN 3

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Se-kiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja)." (A!-Maidah: 48)

Kesatuan Umat

Terkait dengan kesatuan umat, telah saya jelaskan bahwa Islam yang hanif ini dengan tegas telah mewajibkannya dan menjadikannya sebagai bagian yang esensial dalam kehidupan masyarakat Islam, dalam keadaan apapun. Karena, Islam menganggap kesatuan adalah bagian yang tak tepisahkan dari iman, sebagaimana Islam menganggap bahwa perpecahan adalah bagian tak terpisahkan dari kekafiran.

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." (Al-Hujurat: 10)

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman." (Ali Imran: 100)

Artinya, setelah kalian bersatu kemudian bercerai berai. Rasulullah saw. bersabda,

"Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelahku, (yang mana) sebagian kalian menampar wajah sebagian yang lain."

Di sini, Rasulullah mengungkap kalimat kekafiran sebagai pengganti perpecahan, bercerai-berai, dan saling menampar wajah antara sebagian yang satu dengan yang lainnya.

Saya yakin bahwa sistem perwakilan, baik yang parlementer maupun presidensil tidak menolak prinsip kesatuan ini. Apalagi jika warna kehidupan sosial itu satu dalam prinsip dan orientasi globalnya, sebagaimana kondisi umat Islam secara keseluruhan pada hari-hari ini. Sesungguhnya, berbagai fanatisme partai, perpecahan, dan perbedaan pendapat yang senantiasa menyelimuti sistem parlemen di Eropa dan yang lainnya itu dikarenakan ia memang tumbuh dalam situasi berantakan. Konflik-konflik berdarah yang berkepanjangan antara rakyat dengan penguasa merupakan sebab utama munculnya warna sistem parlemen seperti itu, ditambah dengan kecenderungan dan keragaman pendapat. Sedangkan umat Islam, Allah telah menjaga mereka dari semuanya itu, memelihara mereka dengan kesatuan dan toleransi, serta dari perpecahan dan kekacauan.

Kendati demikian, sistem parlemen di tempat kelahiran pendukungnya pun tidak bertumpu kepada asas multi partai. Di Inggris misalnya, cuma ada dua partai. Keduanyalah yang saling bergantian dalam memimpin negara. Bahkan, orientasi kepartaiannya "internal minded" dan selalu dipersatukan oleh masalah-masalah nasionalisme yang penting. Sehingga. keragaman partai sama sekali tidak berpengaruh.

Begitu juga di Amerika, di sana hanya ada dua partai, yang kita tidak mendengar gaungnya kecuali pada musim pemilu. Adapun di luar keduanya itu, maka tidak ada kepartaian. Sedangkan negara-negara yang berkembang dalam iklim kepartaian dan selalu berambisi untuk membentuk partai baru, ia mengalami suasana perang dan damai yang datang silih berganti. Perancis adalah contoh yang paling tepat.

Jika demikian halnya, sementara kesatuan bangsa adalah asas bagi sistem sosial Islam —dan tidak dipermasalahkan oleh sistem parlemen— maka sangat mendesak bagi

kita untuk menegakkan kesatuan, setelah partai-partai yang ada menghancurkan segala-galanya di Mesir.

Partai-partai di Mesir

Telah disepakati bahwa partai-partai di Mesir adalah bagian dari masa kelam negeri ini. la adalah akar kerusakan sosial yang baranya kini masih menyala. Pada hakekatnya ia bukanlah partai sebagaimana yang dikenal oleh berbagai negara di dunia. la tidak lebih dari sekedar rentetan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat individual di tengah umat ini, yang pada suatu ketika mereka terkondisi untuk berbicara atas namanya dan menuntut hak-haknya dengan atas nama nasionalisme.

Sebagaimana telah disepakati bahwa masing-masing partai itu sesungguhnya tidak mempunyai program dan sistem yang istimewa untuk ditawarkan. Tidak ada perbedaan sama sekali antara mereka kecuali sebatas nama-nama tokohnya. Hal ini jelas sekali terlihat dari berbagai keterangan pers di luar pemerintahan dan juga dari telaah terhadap ceramah-ceramah resmi di dalam pemerintahan.

Karena partai-partai itu dipersembahkan oleh tokoh-tokoh dan para wakil rakyat dan mereka pulalah yang mengendalikan sisi luar pemerintahan dalam kehidupan parlemen, maka wajar jika urusan pemerintah tidak berjalan normal. Inilah kondisi riil dari sistem yang hanya mengendalikan sisi luarnya saja.

Ungkapan semacam ini telah disepakati oleh seluruh masyarakat dan dinyatakan dengan lantang oleh para tokoh, wakil rakyat, ulama, serta dan ahli hukum perundang-undangan. Siapa saja yang membaca tulisan Alwi Basya dalam kitabnya ***Mabadi' Al-Wathaniyyah*** atau Al-Ustadz Hasan Al-Jadawi dalam kitabnya ***'Uyuubul Hukmifii Mishr*** tentu akan menemukan bukti kebenaran dari apa yang kami katakan.

Cukuplah di sini kami menukil satu paragraf dari buku ***Mabadi' Al-Qaanun Ad-Dustury*** karangan seorang pakar dalam hukum perundang-undangan Al-Ustadz Sayyid Shabri yang mana ketika berbicara tentang partai-partai di Mesir beliau berkata, "Kenyataannya sebagian besar partai di Mesir tidak mempunyai program kerja yang diperjuangkan para pendukungnya. Bahkan, sebuah partai identik dengan sosok seorang menteri terdahulu yang mempunyai pendukung dan kader. Akibat terpenting dari kondisi ini adalah, pemilu yang diselenggarakan tidak berjalan di atas kompetisi program kerja

dengan slogan "satu untuk semua", namun hanya berdasar kepercayaan kepada seorang tokoh atau kompetisi antar mereka saja. Sehingga, pemilu itu lebih bersifat individual dan bukan kepartaian sebagaimana pemahaman masyarakat Barat. Suatu hal yang wajar jika keberadaan partai-partai seperti itu hanya memecah-belah negara ke dalam golongan-golongan dan kelompok-kelompok, serta menebarkan konflik dan perpecahan antara individu dan keluarga tanpa sebab yang bisa dipahami atau alasan yang masuk akal."

Jika keterangan di atas kita tambah, niscaya akan sampailah pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya Mesir masih terjajah hingga kini. Pihak yang mengambil keuntungan dari perpecahan ini tidak lain adalah para kolonialis-imperialis beserta antek-anteknya. Kalaupun umat diperbolehkan berbeda pandangan (meskipun sebenarnya ia tidak boleh) di suatu bangsa, maka bangsa di lembah sungai Nil ini adalah bangsa yang paling membutuhkan makna kesatuan yang utuh. Hal ini untuk menyatukan kekuatan dalam perjuangan meraih kemerdekaan dalam melakukan perbaikan internal. Dengan Tanggung jawab ini, maka persoalan yang kita hadapi lebih besar lagi.

Pembubaran Partai-partai Mesir

Jika demikian halnya, maka kami tidak tahu persis apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa yang baik ini —bangsanya kaum pejuang dan orang-orang yang mulia— terhadap berbagai golongan dan kelompok manusia yang menamakan dirinya partai-partai politik itu. Sungguh, masalah ini sangat penting. Banyak tokoh yang telah melakukan usaha perbaikan demi persatuan mereka —meski sebentar— untuk menghadapi kondisi sulit yang tengah melanda negeri ini. Namun selalu berakhir dengan keputusasaan dan menuai kegagalan. Sepertinya, tidak ada jalan keluar untuk itu kecuali membubarkan semua partai politik yang ada dan menghimpun kekuatan umat dalam satu partai yang bekerja untuk menyempurnakan kemerdekaan dan kebebasan bangsa, serta meletakkan prinsip-prinsip perbaikan internal secara menyeluruh. Setelah itu, peristiwa demi peristiwa akan melapangkan jalan bagi semua orang untuk hidup dalam iklim yang terstruktur rapi, dalam naungan persatuan yang telah digariskan oleh Islam.

SISTEM PEMERINTAHAN 4

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili (menghukumi) di antara mereka, ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh." (An-Nuur:51)

Penghargaan Terhadap Aspirasi Rakyat
Melalui Sistem Pemilihan Umum

Perihal menghargai aspirasi rakyat dan keharusan untuk mewakili serta mengikutsertakan mereka dalam pemerintahan secara benar, Islam tidak mengharuskan untuk meminta pendapat mereka secara keseluruhan dalam setiap permasalahan —atau dalam istilah kontemporer dikenal dengan ***referendum***— tetapi cukup dengan membentuk ***ahlul halli wal 'aqdi***. Siapa pun mereka tidak menjadi persoalan. Yang jelas, dari pendapat para ahli fiqih kita tahu bahwa orang yang memungkinkan untuk menjadi ***ahlul halli wal 'aqdi*** itu ada pada tiga golongan di bawah ini;

1. Para ahli fiqih yang mujtahid, di mana pendapat-pendapat mereka dalam fatwa dan ***istinbath*** hukum diperhitungkan umat.
2. Para pakar dalam masalah-masalah yang bersifat integral.
3. Mereka yang mempunyai posisi kepemimpinan di tengah masyarakat, seperti tetua suku, tokoh masyarakat, dan pemimpin organisasi.

Mereka inilah yang boleh dimasukkan dalam kelompok ***Ahlul Halli wal Aqdi.***

Sistem parlemen modern telah melapangkan jalan ke arah pembentukan ***ahlul halli wal 'aqdi*** dengan sistem pemilu (dengan segala variasinya) yang telah dirumuskan oleh para pakar hukum. Sesungguhnya, Islam tidak menolak sistem ini, selama benar-benar mengarah kepada pemilihan ***ahlul halli wal 'aqdi.*** Hal itu mudah saja, yakni jika pada setiap pemilu ditetapkan secara tegas kriteria ***ahlul halli wal 'aqdi*** dan tidak memperkenankan selain mereka untuk menduduki kursi parlemen yang mewakili rakyat.

Berbagai Kelemahan Sistem Pemilu di Mesir.

Suatu saat, kita di mesir pernah menerapkan sistem pemilu langsung sesuai undang-undang tahun 1923, dan pada kali yang lain menerapkan sistem perwakilan sesuai undang-undang tahun 1930. Kedua cara itu ternyata tidak dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Ketika pemilu itu dilaksanakan, tampak jelas adanya banyak cacat yang

mengharuskan kita melakukan perbaikan secara menyeluruh. Sebenarnya, kesalahan bukan terletak pada cacat itu sendiri, melainkan pada perasaan rela terhadap cacat itu, terus-menerus melakukannya, dan bahkan mempertahankannya. Itulah kesalahan yang sebenarnya.

Semua orang telah merasakan ketidakmampuan sistem pemilu yang berlaku sekarang untuk merealisasikan tujuan yang telah digariskan, yakni memilih orang-orang yang shalih (terbaik) untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Banyak sekali kritik yang ditujukan kepada pemerintah sebagai pelaksana untuk mengungkap berbagai cacat tersebut. Yang terpenting adalah apa yang diungkapkan oleh Dr. Sayyid Shabry dalam kitabnya ***Mabadi' Al-Qaanun Ad-Dustury.*** Dalam buku itu beliau mengatakan, "Sistem pemilu kita tidak dapat mewujudkan tujuan dari diselenggarakannya pemilu itu sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Pemilu juga tidak berhasil mengakomodasi aspirasi rakyat secara baik. la juga tidak berhasil membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan rakyat tanpa ada tekanan dari pihak lain..."

Setelah itu beliau mengungkap data statistik berupa angka-angka, yang sampai pada kesimpulan bahwa keputusan-keputusan parlemen Mesir dalam berbagai periode tidak mampu mengakomodasikan semua aspirasi rakyat atau mayoritasnya, tidak pula mewakili kelompok minoritas yang juga harus dihargai. la hanya bisa mengakomodasi aspirasi sebagian kecil dari keseluruhan jumlah mereka yang berhak memilih dalam pemilu. Kalau diprosentasekan niscaya tidak lebih dari 12 persen.

Jika demikian hasilnya, bagaimana bisa dikatakan bahwa dewan bisa mengakomodasi aspirasi rakyat dengan benar?

Perbaikan

Harus segera dilakukan upaya perbaikan terhadap undang-undang pemilu. Sisi-sisi yang mendesak untuk dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan kriteria-kriteria khusus bagi calon anggota legislatif. Jika mereka adalah wakil dari organisasi, maka organisasi itu harus mempunyai program kerja yang jelas dan sasaran program yang rinci, yang akan ditawarkan oleh mereka yang dicalonkan itu. Jika mereka tidak mewakili suatu kelompok, maka mereka harus memiliki sifat-sifat yang laik dan konsep untuk pembaharuan. Inilah yang menjadikan mereka layak

untuk menjadi anggota dewan sebagai wakil rakyat. Gagasan ini berarti punya keterkaitan yang erat dengan pembaharuan partai yang ada di Mesir dan apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga politik di sana.

2. Menjelaskan peraturan-peraturan tentang tema kampanye pemilu dan menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, Peraturan-peraturan itu hendaknya tidak menyangkut masalah keluarga, rumah, atau individu yang tidak termasuk dalam kriteria kelayakan untuk pemilihan, tetapi berkisar pada metode dan langkah-langkah pembaharuan.
3. Memperbaiki aturan pelaksanaan pemilu dan sosialisasinya, karena masalah peraturan ini sering dipermainkan oleh ambisi partai dan kepentingan pemerintah pada waktu-waktu belakangan ini, di samping juga adanya pemaksaan dalam memilih.
4. Memberikan sanksi yang berat kepada setiap penyimpangan dalam pelaksanaan dan praktek suap dalam pemilihan,
5. Jika pemilihan dilakukan dengan memilih tanda gambar dan bukan memilih orang, maka itu lebih baik, sehingga para calon legislatif tidak bisa memaksa para pemilihnya dan kepentingan umum akan bisa diletakkan di atas kepentingan pribadi dalam menilai dan berhubungan dengan para caleg.

Mengenai cara yang diterapkan guna perbaikan itu memang banyak ragamnya. Yang disebutkan tadi adalah sebagiannya saja. Jika sebuah keinginan diupayakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, niscaya akan terbuka jalan menuju ke sana. Merupakan sebuah kesalahan besar jika kita hanya terpaku dengan kondisi sekarang ini, rela, dan berusaha lari dari upaya perbaikan.

SISTEM PEMERINTAHAN 5

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat," (An-Nisa': 105)

Pada bab-bab yang lalu telah saya paparkan mengenai tiga pilar penyangga bagi sebuah pemerintahan yang shalih dalam sistem Islam atau dalam sistem parlemen, yakni:

1. Tanggungjawab pemerintah,
2. Kesatuan umat, dan
3. Penghargaan terhadap aspirasi rakyat.

Secara sangat ringkas saya kupas beberapa kerancuan dalam sisi metodologis dan cacat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang telah kita terapkan sejak diberlakukannya UUD Mesir sampai sekarang.

Akibat dari kerancuan, cacat, dan kerusakan tadi adalah kebingungan dan keresahan sebagaimana yang saat ini kita alami, bahkan sampai pada perpecahan, pertikaian, dan konflik.

Kelemahan Pemerintah

Tidak ada satu pun yang membantah kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang sudah-sudah, secara berturut-turut lemah dalam menunaikan tugas-tugasnya. la telah kehilangan kewibawaan di mata umat untuk layak disebut sebagai sebuah pemerintahan. Hal ini bermula dari sikap melecehkan al-haq dan pada saat yang sama kebatilan tumbuh subur memenuhi ruh fanatisme kepartaian. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan, akibat tidak adanya batasan Tanggung jawab yang jelas dan kekuatan untuk menunaikannya. Kalaupun mentalitas masyarakat Mesir ini tidak tercelup oleh ketaatan dan ketundukan —sementara agenda kerja berjalan secara rutin begitu saja tanpa ada pembaharuan dan perbaikan— tentu semuanya akan macet.
Dan bisa dipastikan sistem manajemen yang goncang ini tidak mampu untuk bangkit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau mempersembahkan aktivitas yang bermanfaat buat mereka.

Kebesaran Undang-undang

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan undang-undang juga telah rapuh dan kehilangan wibawanya. Hal ini disebabkan oleh maraknya ketidakadilan dan tipudaya yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Kadang-kadang juga terjadi pelecehan terhadap hukum dengan cara menghapus sebagian butirnya atas nama kepentingan dan ambisi pribadi. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ini

diketahui siapa saja, maka hal itu akan berinteraksi dalam jiwa dan akan tetap memperoleh sebuah kebesaran undang-undang dan penghormatan terhadap hukum.

Fanatisme (Buta) Kepartaian

Tidak bisa dipungkiri bahwa bara permusuhan dan kebencian telah bersemayam dalam jiwa para pemimpin dan rakyat secara sama, akibat sistem kepartaian yang salah dan fanatisme yang membabi buta, yang kita di Mesir tidak memahaminya sekedar sebagai perbedaan pendapat yang tidak sampai merusak solidaritas. Namun, kita mendapati bahwa ia sudah menjurus pada permusuhan dan kebencian. Pandangan kita terhadap kemaslahatan umum berubah menjadi pemboikotan setiap masalah yang umum maupun yang khusus. Bahkan, kebencian itu sampai pada tingkatan kita memandang al-haq —yang ada pada lawan partai kita—sebagai kebatilan, dan sebaliknya, kebatilan—yang ada pada pendukung kita— kita anggap sebagai al-haq.

Perasaan seperti ini melingkupi semua perilaku dan tata hubungan kita dengan orang lain. Penyakit itu demikian kronis dan sudah merambah sampai pada perilaku yang paling sepele sekalipun. Pada saat itu kita tidak akan bisa menyatukan barisan kita dalam setiap sikap kebangsaan, meski itu menyangkut masalah perbaikan urusan kita dan demi masa depan bangsa kita.

Rasa dengki dan pemahaman yang keliru tentang kepartaian inilah yang akan berubah menjadi tradisi permusuhan. Akibatnya, sebagaian besar potensi fikriyah dan amaliyah kita tercurah pada dua hal dan para pendukung partai akan tenggelam di dalamnya. Kedua hal itu adalah: terjebak dalam permusuhan partai, dan berusaha untuk menjegal dengan tipudayanya. Pemerintah akan berusaha mengerahkan semua potensinya kepada dua hal ini, sementara dari kalangan oposisi juga tidak kalah perhatiannya dari pemerintah dalam hal ini. Demi realisasinya, banyak hak yang terlantar dan banyak kepentingan yang terabaikan. Teman menjadi sedih, sementara lawan merasa lega dan musuh yang sesungguhnya (penjajah) akan memanfaatkan kepala negara (untuk dipermainkan).

Kondisi seperti ini telah mengakibatkan kehancuran spiritual serta kerusakan dan kegoncangan material. Kondisi itu akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya, sementara tidak ada lagi yang mampu melesatkan anak panah kesabaran. Memang harus

dilakukan revolusi total. Adakalanya para penguasa menyadari masalah ini dan benar-benar rnemperhatikannya, sehingga bersegera untuk melakukan perubahan yang shalih dengan pendapat sekaligus amalnya. Saat itulah kita akan selamat dan kembali tenang. Memang, waktu masih sangat memungkinkan untuk melakukan perbaikan.

Namun, adakalanya kita berlama-lama dalam pengabaian dan ketidakpedulian, sehingga didahului oleh berbagai peristiwa. Akibatnya, tampuk kepemimpinan akan terlepas dari tangan dan tidak ada yang tahu apa akibat yang akan terjadi kecuali Allah.

Wahai penguasa negeri ini! Wahai kepala negara! Wahai para ulama Al-Azhar!

Wahai para pemimpin partai, organisasi, dan lembaga...! Wahai mereka yang masih mempunyai kepedulian terhadap negeri ini!

Pahamilah masalah ini sebelum ia berlalu...! Dan di depan kalian terdapat kapal penyelamat dari sistem Islam.... Sungguh, bagi Allah-lah kembalinya semua perkara.

Bukankah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah!

Problem-problem Internal Kita Dalam Kacamata Sistem islam

SISTEM EKONOMI

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam tulisan saya yang berjudul "Problematika Internal Kita dalam Pandangan Islam", saya menjelaskan bahwa sistem politik Islam berdiri di atas tiga pilar, yaitu:

a. Tanggung jawab penguasa,

b. Penghormatan terhadap aspirasi umat, dan

c. Pemeliharaan kesatuan umat.

Merupakan suatu keharusan apabila pilar-pilar ini dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan sebagai wakil rakyat. Sebagaimana saya jelaskan bahwa sesungguhnya kita belum menerapkan sistem ini dengan baik. Akibatnya, semua permasalahan menjadi berantakan, mengingat penerapan sistem ini merupakan pangkal dari segala permasalahan yang timbul kemudian.

"Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut baik, maka baik pula seluruh jasad, Tetapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, bahwa segumpal darah itulah hati."

Pemerintah —tidak diragukan lagi— merupakan jantung bagi perbaikan kondisi sosial secara keseluruhan. Jika kondisi pemerintah telah rusak, maka rusaklah segala urusan. Namun sebaliknya, jika kondisi pemerintah baik, maka baik pulalah segala urusan. Dalam hal ini saya telah menghimbau kepada segenap petinggi agar secepatnya melakukan pembenahan. Berbenah diri untuk segera kembali kepada Islam yang hanif dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan demikian, mereka akan mendapat petunjuk dan berjalan di bawah terangnya sinar Islam. Tanpa Islam, kita tidak akan mampu melakukan ***ishlah*** (perbaikan) sebagaimana yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian kita. Harapan saya, semoga tulisan ini mendapatkan telinga yang mau mendengarkan dan hati yang mau meyadari bahwa betapa pentingnya memecahkan semua problem ekonomi kita

sebelum penyakit yang mematikan ini menjalar dan sebelum kita kesulitan mencari obatnya. Sebelum robekan baju ini lebih lebar dari kain penambal yang kita sediakan. Tidak ada sesuatu yang dapat menggerakkan batin, menyibukkan pikiran, dan menyakitkan perasaan, selain keterhirapitan materi. Problem ini dapat mencekik rakyat dan menghalanginya dari mendapatkan kebutuhan hidup yang bersifat primer, apalagi yang sekunder. Tidak ada problematika ekonomi yang lebih pelik dari pada problem roti. Tidak ada bencana yang lebih berat dirasakan daripada bencana kelaparan dan kemiskinan. Tidak ada keperluan hidup yang lebih mendesak daripada kebutuhan akan bahan makanan pokok.

Suatu ketika seorang budak perempuan masuk menemui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (sahabat Abu Hanifah) lalu berkata, "Tuanku, bahan makanan telah habis." Asy-Syaibani menjawab, "Semoga Allah membinasakanmu. Kau telah menghilangkan empat puluh masalah dari kepalaku."

Ada banyak fenomena yang tidak dapat dibantah atau diabaikan begitu saja oleh siapa pun, yaitu:

KENYATAAN ALAM

Sesungguhnya, negeri ini tidak miskin. Bahkan bisa jadi negeri ini adalah negeri paling kaya dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang bermacam-macam, yakni yang dihasilkan oleh pertanian, laut, peternakan, pertambangan, serta sungai Nil yang menakjubkan dengan lembahnya yang sangat subur. Semua itu merupakan karunia Allah swt. kepada Mesir dan penduduknya sejak dahulu. Sebagaimana firman-Nya,

"Turunlah (tinggallah) kamu di negeri Mesir, maka di sana kamu akan mendapatkan semua yang kamu minta." (Al-Baqarah: 61)

EKSPLOITASI BANGSA ASING

Orang asing yang telah menduduki negeri ini —sebagai akibat dari kelalaian penduduk, kecerobohan penguasa, dan kezhaliman penjajahnya— menjadi bangsa yang lebih sejahtera daripada penduduk Mesir dan anak keturunannya. Mereka telah menancapkan cakar-cakamya pada sumber-sumber kekayaan di Mesir secara berserikat maupun sendiri-sendiri. Industri dan perdagangan, perusahaan-perusahaan umum, serta badan-badan usaha vital lainnya sebetulnya telah berada di tangan orang-orang asing.

Mereka adalah orang-orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan Mesir sebagai simbol, padahal mereka masih mencintai negerinya dan memboyong banyak keuntungan ke negerinya. Sesungguhnya, sangat banyak di antara orang-orang asing itu yang memandang penduduk Mesir; pekerja Mesir; dan pemerintah Mesir dengan pandangan yang tidak jujur

KESENJANGAN ANTARA KEKAYAAN YANG MELIMPAH DAN KEMISKINAN YANG MENCEKIK

Sesunggughnya, kita melihat adanya perbedaan yang jauh dan kesenjangan yang sangat lebar antara berbagai kelompok di masyarakat. Kita melihat adanya kesenjangan yang sangat mencolok antara kekayaan yang melimpah pada suatu kelompok dan kemiskinan yang menghimpit pada kelompok lain. Kita hampir tidak mendapatkan masyarakat yang mempunyai kelas ekonomi menengah. Kelompok yang kita sebut-sebut sebagai kelas menengah tidak lain adalah orang-orang fakir yang hidup dalam keterbatasan. Kita mengingat adanya sebuah kaidah bahwa sebagian kesulitan itu ada yang lebih ringan dari sebagian yang lain. Semoga Allah merahmati ***para fuqaha'*** kita yang telah membahas dengan panjang lebar masalah perbedaan antara fakir dan miskin, walaupun keduanya termasuk kelompok yang sedang membutuhkan.

PEREKONOMIAN YANG TIDAK MENENTU

Satu hal yang sangat penting bahwa sesungguhnya kita sedang kebingungan di tengah sistem-sistem ekonomi yang sedang berperang; Kapitalisme, Sosialisme, atau Komunisme. Kita tidak mampu memilih warna bagi perekonomian kita pada saat sangat dibutuhkan agar kita segera menjatuhkan pilihan tegas. Saat sebelum problematika menjadi lebih pelik dan membutuhkan pemecahan yang sangat rumit. Sekarang, yang kita butuhkan adalah kejelasan yang sempurna, menentukan pilihan dengan cermat, serta berupaya mencapainya dengan segenap potensi dan tekad yang kuat.

Kondisi seperti ini, walaupun tidak dapat dilepaskan dari masalah politik, tetapi apabila dilihat dari bentuk, sebab, dan dampaknya merupakan problema ekonomi. Oleh karena itu, kita harus berani menentukan satu pilihan warna di antara warna-warna yang ada atau —bila mampu— memilih selain dari warna-warna tersebut. Dengan begitu, kita

bisa hidup dalam batasan yang jelas dan menentu, serta mempunyai kepribadian yang berbeda dengan yang lain. Sebuah kehidupan ekonomi yang mempunyai sasaran dan jalan yang akan ditempuh untuk mencapainya.

MENUJU ISLAM

Menurut saya, tidak ada baiknya sama sekali apabila kita memilih salah satu dari sistem-sistem di atas. Setiap sistem di atas mempunyai kekurangan di samping terlihat memiliki sisi baik. Sistem-sistem tersebut lahir bukan di negeri kita dan untuk diterapkan bukan pada situasi yang sama dengan situasi kita serta kondisi masyarakat yang tidak sama dengan masyarakat kita. Namun, kita sudah mempunyai sebuah sistem yang paripurna. Sistem inilah yang akan mengantarkan kita menuju kebaikan nan sempurna dalam bimbingan Islam yang hanif.

Dalam masalah ekonomi, Islam telah meletakkan kaidah-kaidah global yang sangat prinsip. Apabila kita memahami dan menerapkannya dengan sempurna, maka kita akan mampu menyelesaikan semua problem ekonomi. Dengan sendirinya, kita akan mendapatkan sisi-sisi baik dari berbagai sistem buatan manusia dan menjauhi kejelekannya. Tingkat kesejahteraan akan terangkat dan tidak akan ada kecemburuan sosial. Dengan demikian, kita telah menemukan jalan terdekat untuk menuju kemakmuran.

SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM

Sudah saya sebutkan bahwa saat ini Mesir tengah berada di tengah pergulatan antar berbagai sistem ekonomi; kapitalisme, Sosialisme, dan Komunisme. Oleh karena itu, sebaiknya Mesir segera melepaskan diri dari semua corak ekonomi tersebut, lalu memusatkan kehidupan ekonominya kepada tatanan Islam dan arahan-arahannya yang baik, serta menjadikannya sebagai acuan. Dengan demikian, Mesir akan selamat dari semua akibat negatif yang ada pada sistem-sistem tersebut dan mampu menyelesaikan problem ekonominya dalam jangka waktu yang singkat.

Sistem ekonomi Islam yang sangat penting teringkas sebagai berikut:

1. Islam memegang harta yang baik sebagai pilar kehidupan yang harus dipelihara, diatur, dan dimanfaatkan.
2. Kewajiban bekerja dan berprofesi bagi setiap orang yang mampu.

3. Islam mewajibkan menguak semua sumber daya alam dan memanfaatkan semua potensi yang tersedia di alam semesta.
4. Islam mengharamkan semua profesi yang tidak terpuji.
5. Mendekatkan jarak antar tingkatan sosial yang pada akhirnya menutup jurang antara si kaya dan si miskin.
6. Jaminan sosial bagi setiap warga negara, asuransi bagi kehidupan, dan upaya untuk mensejahterakan mereka.
7. Islam menganjurkan infaq pada semua lahan kebaikan, terciptanya kepedulian sesama warga negara, serta saling menolong dalam kebaikan dan taqwa.
8. Menjunjung nilai harta dan menghormati hak milik pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
9. Mengatur transaksi permodalan dengan undang-undang yang adil dan santun, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap modal.
10. Penegasan terhadap tanggung jawab negara untuk melindungi sistem ini.

Orang yang mau memperhatikan ajaran-ajaran Islam, tentu menemukan bahwa prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan kitab-kitab fiqih secara panjang lebar.

HARTA YANG BAIK ADALAH PIIAR KEHIDUPAN

Islam menyanjung harta yang baik, mewajibkan kita mencarinya, serta mengatur dan mengembangkannya dengan baik. Bahkan, Islam mengangkat kedudukan orang kaya yang bersyukur dengan menggunakan hartanya untuk kepentingan orang lain demi mengharap ridha Allah. Islam tidak menganjurkan umatnya agar menjalani hidup miskin, sebagimana yang dipahami secara salah terhadap pengertian zuhud. Sedangkan ajaran yang mencela dunia, harta, dan penghasilan adalah ditujukan kepada kekayaan yang membuat seseorang melampaui batas ***(israf),*** terfitnah, dan berfoya-foya. Ajaran yang mencela dunia itu juga ditujukan kepada orang yang menggunakan hartanya untuk perbuatan dosa dan maksiat, serta mengkufuri nikmat Allah. Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shalih."

Allah berfirman,

"Jangan kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta-hartamu yang telah dijadikan oleh Allah sebagai tiang kehidupan." (An-Nisa': 5)

Hal itu merupakan suatu isyarat bahwa harta merupakan tiang amal perbuatan. Rasulullah saw. telah melarang menghabiskan harta bukan pada tempatnya. Beliau bersabda,

"Sesungguhnya, Allah melarang kamu mengobral omongan tentang semua hal yang pernah didengarkan, banyak bertanya dan menghamburkan harta."

Beliau juga pernah menjelaskan bahwa orang yang mati demi hartanya adalah syahid,

"Barangsiapa mati demi membela harga dirinya, maka ia mati syahid. Barangsiapa mati demi membela hartanya, maka ia mati syahid."

KEWAJIBAN BEKERJA BAGI YANG MAMPU

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari rizki. Islam menganggap usaha mencari rizki sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang mempunyai kemampuan. Islam juga menghargai dan menyanjung orang yang mempunyai pekerjaan dan keahlian, mengharamkan meminta-minta, serta menyatakan bahwa sebaik-baik ibadah adalah bekerja. Bekerja itu merupakan sunah para Nabi. Islam juga menerangkan bahwa sebaik-baik usaha ialah mencari rizki dengan tangannya sendiri. Sangat berdosa orang yang menjadi pengangguran dan orang yang hidup dari belas kasihan masyarakat, meskipun dengan alasan agar ibadahnya tidak terganggu. islam tidak mengenal prinsip hidup menganggur seperti ini.

Tawakal kepada Allah harus disertai dengan usaha, sehingga ada hasil yang dicapai. Orang yang tidak melakukan salah satu di antara keduanya bukan termasuk orang yang bertawakal. Rizki yang telah ditentukan itu pun harus disertai dengan usaha yang terus-menerus. Allah swt. berfirman,

"Dan katakanlah (hai Muhammad), bekerjalah kamu, niscaya Allah melihat pekerjaanmu, juga rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata.

Maka ia memberitahu kepadamu apa yang telah kamu perbuat." (At-Taubah: 105)

Rasulullah bersabda,

"Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah Daud as. makan dari hasil usahanya."

Umar pernah berkata, "Janganlah seorang di antara kamu mencari rizki dengan duduk-duduk sambil berkata, 'Ya Allah, berilah aku rizki.' Padahal, ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas atau perak."

Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Seseorang akan terus-menerus meminta-minta sampai ia akan datang pada hari Kiamat kelak sedangkan wajahnya tidak ada dagingnya."

PEMANFAATAN KEKAYAAN ALAM

Islam memerintah kita agar mengamati alam semesta yang di dalamnya terkandung berbagai sumber kekayaan, sebagaimana ia juga menganjurkan untuk memelihara dan mendayagunakannya. Semua yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi umat manusia agar mereka mengambil manfaat darinya. Allah swt. berfirman,

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Dan Dia menyempurnakan untukmu semua nikmat-Nya, baik yang lahir maupun batin." (Luqman: 30)

"Dan Allah menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Sesungguhnya, yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir." (Al-Jatsiyah: 13)

Orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentu mendapatkan penjelasannya secara panjang-lebar.

LARANGAN MENEKUNI USAHA YANG TIDAK TERPUJI

Termasuk di antara ajaran Islam adalah mengharamkan bentuk-bentuk mata pencaharian yang buruk. Sedangkan batasan buruk dalam hal usaha ini adalah cara

memperoleh pendapatan yang tidak sebanding dengan jerih payah, seperti: jalan pintas dengan sistem riba, judi, mengundi nasib, dan perbuatan lain yang sejenisnya. Termasuk juga dalam kategori buruk adalah perbuatan-perbuatan tercela yang diharamkan, seperti: penipuan, pencurian, dan sebagainya. Kita juga tidak dibolehkan meraup penghasilan dari usaha memperdagangkan komoditi yang diharamkan, seperti: hasil penjualan khamr, daging babi, dan sebagainya. Semua sumber penghasilan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh Islam.

KESENJANGAN SOSIAL

Islam berusaha mendekatkan jarak antara kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, antara lain dengan mengharamkan penimbunan barang komoditi, melarang pamer kekayaan, anjuran untuk mengentaskan kemiskinan, menegaskan adanya hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya dan dalam kekayaan negara, serta meletakkan panduan operasional untuk melaksanakan itu semua.

Islam juga banyak menganjurkan dan mendorong umatnya untuk berinfaq di setiap jalan kebajikan, mencela sikap kikir, riya', dan mengungkit-ungkit pemberian sehingga menyakiti orang lain, serta menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama yang baik dengan mengharap ridha Allah dan pahala yang baik di sisi-Nya. Allah berfirman,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (Al-Maidah: 2)

KESUCIAN HARTA DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK MILIK

Islam menegaskan kesucian harta dan mengakui kepemilikan pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Rasulullah saw. bersabda,

"Setiap muslim dengan muslim yang lainnya adalah haram; darahnya, kehormatannya, dan hartanya."

"Tidak ada kesulitan dan tidak boleh saling mempersulit."

MENGATUR TRANSAKSI HARTA BENDA

Islam mensyari'atkan pengaturan atas transaksi harta benda dalam batas kepentingan pribadi dan masyarakat, menghormati semua perjanjian dan kesepakatan, serta pengawasan yang ketat terhadap masalah uang dan penggunaannya. Bahkan, fiqih

Islam membahas masalah ini dalam bab-bab tersendiri, yakni mengharamkan tindakan "main-main" dengan uang, misalnya ***sharf*** [1]). Di sini, terlihat dengan jelas hikmah dari diharamkannya pemakaian emas dan perak, sebab keduanya telah dianggap sebagai alat pembayaran internasional.[2])

JAMINAN SOSIAL

Setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial, ketenangan, dan penghidupan yang layak; bagaimanapun kondisinya, baik ketika dia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maupun ketika tidak mampu melaksanakan kewajibannya dikarenakan halangan tertentu.

Umar bin Khathab ra. pernah bertemu dengan seorang Yahudi yang meminta-minta. Ketika Umar mengerti bahwa orang Yahudi tersebut benar-benar dalam kondisi menderita, maka ia pun menyesal dan mencela dirinya sendiri. Kemudian Umar berkata pada si Yahudi tersebut, "Sungguh kami telah berbuat tidak adil kepadamu. Kami memungut jizyah darimu pada waktu kamu masih sehat, lalu kami menyia-nyiakan kamu pada waktu kamu telah lanjut usia." Umar lalu memerintahkan kepada pegawainya, "Berilah ia harta dari Baitul Mal yang cukup untuk kehidupannya."

Di samping itu, Islam berusaha untuk menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada semua anggota masyarakat.

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Islam menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi sistem ini. Negara berkewajiban menggunakan kekayaan rakyat dengan sebaik-baiknya, memungut dengan cara yang baik dan menggunakannya dengan cara yang baik pula, serta adil dalam menggalinya. Umar bin Khathab ra. pernah berkata yang maksudnya adalah sebagai

---

[1] Sharf ialah pertukaran antara dua mata uang dengan aturan tertentu. Hal ini bisa didapatkan dalam kitab-kitab fiqih.

[2] Islam mengharamkan penggunaan emas dan perak secara mutlak untuk bejana dan perabot khusus, dan mengharamkannya sebagai perhiasan bagi laki-laki. Diharamkan juga bagi perempuan bila pemakaiannya secara berlebihan. Yang demikian itu dikarenakan kebutuhan negara terhadap tabungan logam mulia ini lebih diutamakan daripada pemakaian yang bersifat pribadi.

berikut, "Sesungguhnya harta ini adalah milik Allah, sedangkan kalian adalah hamba-hamba-Nya."

PENYALAHGUNAAN JABATAN

Islam melarang setiap pemimpin dari menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Islam juga melaknat penyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi saksi tindak penyuapan. Islam juga mengharamkan hadiah kepada para pejabat dan petinggi pemerintahan.

Umar bin Khathab ra. memberi gaji kepada para gubernurnya lebih besar dari penghasilan mereka. Beliau juga pernah mengatakan kepada salah seorang gubernurnya, "Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Sesungguhnya kamu telah menimbun api dan mewariskan cela."

Abu Bakar ra. pernah berkata kepada jamaah kaum muslimin ketika beliau menjadi khalifah, "Dahulu saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya. Namun sekarang saya bekerja untuk kamu sekalian. Oleh karenanya berilah aku bagian dari Baitul Maal kalian." Maka, Abu Ubaidah pun memberinya sama dengan bagian makanan pokok orang muslim yang lainnya, tidak lebih dan tidak kurang. Beliau juga mendapat jatah pakaian, (sepotong untuk musim dingin dan sepotong untuk musim panas), serta kendaraan yang beliau gunakan untuk bepergian dan pergi haji. Gaji beliau diperkirakan senilai 2.000 dirham. Pada waktu Abu Bakar berkata, "Gaji itu ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan saya", Abu Ubaidah memberikan tambahan 500 dirham, dan selesailah urusannya.

Demikianlah hakekat sistem ekonomi Islam dan beberapa ringkasan dari kaidah-kaidah yang ada padanya. Semua saya rangkum dalam penjelasan yang sangat ringkas. Setiap kaidah dari kaidah-kaidah tersebut membutuhkan perincian yang dapat ditulis dalam berjilid-jilid buku. Apabila kita mau menjadikannya sebagai pedoman dan berjalan dalam sinarnya, tentu kita akan memperoleh banyak manfaat dan kebaikan.

KEMANDIRIAN MATA UANG MESIR

Saya telah menyebutkan beberapa prinsip yang dijadikan sebagai landasan bagi sistem ekonomi Islam, serta nilai-nilai yang diberikan oleh prinsip-prinsip itu kepada kita

sekalian. Apabila sistem itu diterapkan dengan baik, maka kondisi perekonomian kita akan berubah menjadi baik.

Prinsip itu menghendaki agar kita mempunyai mata uang sendiri sekaligus diakui sebagai tabungan tetap yang diambil dari sumber kekayaan dan emas kita sendiri. Bukannya dari kantor kas Inggris, perusahaan pencetakan uang Inggris, dan tidak pula dari bank-bank swasta milik orang Inggris, sekalipun ia berada di wilayah Mesir. Renungkanlah firman Allah berikut ini,

"Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta-hartamu yang dijadikan oleh Allah sebagai pilar hidup bagimu." (An-Nisa': 5)

Fenomena ketertipuan yang jelas, terlihat pada bangsa Mesir yang bersedia menyerahkan tenaga dan kekayaan mereka dengan imbalan beberapa lembar kertas yang tiada berharga kecuali dengan jaminan dari Inggris.

Jika Mesir membulatkan tekad dan mengatur semua anggaran belanjanya, tidak diragukan lagi ia akan mendapatkan kemandirian mata uangnya.

Kita telah melepaskan diri dari mata uang (Pound) Sterling, kita juga telah memikirkan perihal dominasi bank swasta, dan kita juga telah menuntut kepada pemerintah Inggris untuk segera mengembalikan pinjamannya kepada kita. Semua ini merupakan proyek pengamanan terhadap uang Mesir.

Barangkali merupakan suatu kontroversi apabila saya menulis pernyataan ini, pada saat disiarkan oleh berbagai media bahwa perundingan-perundingan antara Mesir dan Inggris mengenai devisa Sterling hampir mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh kecongkakan dan keengganan Inggris membayar kepada Mesir (pada tahun 1948) lebih dari 12 juta, sementara Mesir hanya menuntut 18 juta.

Lemahnya pengawasan terhadap keuangan telah mengakibatkan rendahnya nilai uang itu hingga mencapai batas ketidakberdayaan. Keadaan ini lebih parah lagi dengan membubungnya biaya hidup dan sulitnya kegiatan ekspor-impor.

Belum pernah terjadi dalam sejarah negara-negara beradab, seperti yang kita lihat sebuah bank menggunakan keputusan menteri secara tidak benar. Hal itu dilakukan oleh sebuah bank swasta terhadap keputusan menteri keuangan yang tidak bertanda tangan, tertanggal 5 Juni 1916. Selanjutnya, beredarlah mata uang sekehendaknya.

NASIONALISASI PERUSAHAAN

Prinsip-prinsip yang kita ajukan ini menghendaki adanya perhatian yang serius terhadap perlunya nasionalisasi perusahaan-perusahaan dan penggantian modal asing dengan modal nasional, selama hal itu memungkinkan dan membersihkan diri dari dominasi tangan-tangan asing terhadap sarana-sarana umum kita. Tidak bisa dibenarkan sama sekali jika tanah, bangunan, angkutan, air, penerangan, transportasi dalam dan luar negeri, sampai garam dan soda, semua dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing yang modal dan keuntungannya mencapai jutaan pound. Sementara penduduk pribumi hanya mendapatkan kesengsaraan semata.

EKSPLOITASI SUMBER-SUMBER KEKAYAAN

Memanfaatkan sumber daya alam secara cepat dan produktif adalah usaha yang diwajibkan oleh Islam. Al-Qur'an menyuruh kita memperhatikan alam semesta yang merupakan wujud nyata dari rahmat Allah, titipan Ilahi yang tersimpan di dalam perut bumi dan di langit. Islam juga mengatur hukum ***rikaz*** (barang temuan) secara panjang lebar, sebagaimana Islam juga menganjurkan agar kita berusaha mendapatkan kekayaan di mana pun kita berada.

Kita memiliki kekayaan di laut, gurun pasir, dan setiap tempat. Semuanya menunggu pemikiran yang terarah, tekad yang kuat, dan tangan yang terampil sehingga kita dapat memilikinya. Allah berfirman,

"Tidakkah kamu perhatikan, Allah menurunkan air dari langit. Lalu Allah keluarkan dengan air itu buah-buahan yang mempunyai warna yang bermacam-macam. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya serta ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam jenisnya. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama." (Fathir; 27-28).

Menurut saya, ulama di sini ialah orang yang mempunyai ilmu tentang rahasia alam semesta, manfaatnya bagi umat manusia, dan keindahan penciptaannya. Semua itu sebagai bukti betapa luasnya ilmu Allah, sang Pencipta langit dan bumi seisinya. Sangat banyak proyek nasional yang berskala besar terbengkelai sejak lama. Semuanya disebabkan oleh sifat suka menunda-nunda dan malas, atau sebagai akibat dari

pertentangan antar golongan dan sikap mendahulukan kepentingan perorangan. Atau diporak-porandakan oleh berbagai permainan politik dan kegiatan suap-menyuap yang diharamkan. Semua ini harus dihadapi dengan motifasi yang baru. Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah menyukai salah seorang di antara kamu yang bekerja secara profesional."

Betapa besar keuntungan yang kita peroleh andaikan proyek Bendungan Aswan benar-benar terwujud sejak tahun 1937? Betapa menderitanya kita dulu, jika seandainya Allah tidak memberi ilham kepada Thal'at Harb —semoga Allah meridhainya— untuk mengajukan proyek-proyek Al-Mahallah?

Banyak proyek yang selesai dikaji dan dipelajari, lalu diletakkan di rak dan musnah dimakan usia pada masa sebelum perang, Hal ini tidak boleh terus dibiarkan, mengingat kita sekarang sangat membutuhkannya dan masalahnya tidak bisa ditangguhkan lagi.

Singkirkan debu yang menutupi berkas proyek-proyek itu. Pelajari kembali dan laksanakan.

"Niscaya Allah akan melihat perbuatanmu dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin." (At-Taubah: 105).

PERINDUSTRIAN

Perubahan menuju era Industri dengan segera adalah salah satu ruh (jiwa) Islam. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda,

"Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang mempunyai keahlian."

"Barangsiapa yang bermalam dengan makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, maka ia bermalam dengan mendapat ampunan dari Allah."

Kitabullah memberikan sanjungan kepada Daud dan Sulaiman yang mempunyai kemajuan di bidang industri. Al-Qur'an juga memberitahu kita akan kepandaian mereka dalam bidang ini yang melebihi kemampuan orang lain. Selain itu digunakan pula potensi para jin.

Allah swt. berfirman,

"Dan kami telah melunakkan besi kepadanya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." (Saba': 10-11).

"Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Maka hendakiah kamu bersyukur kepada Allah." (AI-Anbiya: 80).

Tidak ada alasan bagi orang yang membaca ayat-ayat ini untuk tidak mempunyai sebuah pabrik senjata.

"Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan satu bulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Kami alirkan pula cairan tembaga baginya. Sebagian dari bangsa jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin dari Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami timpakan kepadanya adzab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu bekerja pada Sulaiman untuk apa yang dikehendakinya, berupa gedung-gedung tinggi, patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang kokoh. Bekerjalah hai keluarga Daud, sebagai rasa syukur kepada Allah." (Saba': 12-13).

Tidak ada alasan bagi bangsa yang membaca ayat-ayat ini untuk tidak memiliki satu pun pabrik pengecoran baja, atau pabrik yang representatif untuk pembuatan alat-alat dari besi dan baja.

Anda telah membaca firman Allah,

"Dan telah Kami turunkan besi, di dalamnya terdapat kekuatan yang hebat dan mendatangkan manfaat bagi umat manusia. (Al-Hadid: 25).

Akankah anda biarkan begitu saja kekayaan yang berupa logam, padahal logam yang anda miliki termasuk jenis yang terbaik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia selama dua ratus tahun seperti yang dikatakan oleh para ahli?

Ini semua tidak boleh terjadi!

SISTEM HAK MILIK DI MESIR

Pada pembahasan terdahulu telah saya sebutkan beberapa contoh terapan mengenai sistem ekonomi Islam. Sekarang, saya akan menyebut kembali beberapa kaidah itu dalam kaitannya dengan perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Jiwa Islam yang hanif dan Undang-undang Pokok Perekonomian Nasional menghendaki agar kita melakukan kajian ulang terhadap Undang-undang Hak Milik di Mesir. Kita perlu mengadakan pembatasan terhadap hak milik perorangan dalam jumlah besar, dan mengingatkan pemiliknya terhadap hak masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap mereka. Kita harus memotivasi golongan ekonomi kelas bawah agar mereka merasa menjadi bagian dari negeri ini dan merasa memiliki negeri ini. Kita harus memberikan subsidi agar mereka tumbuh menjadi besar.

PENERTIBAN PAJAK

Ruh Islam dalam undang-undang ekonominya mengharuskan kita segera melakukan penertiban terhadap segala pajak sosial, terutama zakat. Tidak ada undang-undang pajak yang dipungut dari modal (bukan dari keuntungan) yang lebih baik dari Islam. Hal ini mengandung banyak hikmah, antara lain: mencegah terjadinya penimbunan dan macetnya peredaran kekayaan sebab, pada dasarnya harta itu harus beredar supaya dapat dimanfaatkan oleh orang yang dilaluinya.

Islam menjadikan penyaluran zakatnya bersifat sosial kemasyarakatan. Dengan harapan dapat memperbaiki sesuatu yang tidak sanggup diperbaiki oleh perasaan dan simpati seorang manusia. Dengan zakat, masyarakat akan menjadi suci dan bersih, jiwa manusia akan menjadi bening dan terpuji. Allah berfirman,

"Pungutlah dari kekayaan mereka shodaqah (yang dengan zakat itu) kamu telah mensucikan dan membersihkan mereka." (At-Taubah: 103).

Oleh karena itu, harus ada perhatian yang serius terhadap pemungutan pajak sosial berdasarkan kaidah perkembangannya (yang didasarkan pada jumlah harta secara keseluruhan, bukan atas keuntungan saja). Kalau hal ini bisa ditegakkan, dengan sendirinya kemiskinan akan segera teratasi. Orang-orang kaya yang banyak mempunyai harta dikenakan pungutan wajib dan disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan semua cara yang memungkinkan.

Di antara kehebatan yang dimiliki oleh Umar bin Khathab ra., beliau mengenakan pajak yang tinggi terhadap buah anggur. Sebab, anggur saat itu identik dengan buah-buahan orang kaya. Beliau juga mengenakan pajak terhadap buah kurma, tetapi tidak menentukan ukurannya, mengingat kurma adalah buah-buahan yang dimiliki oleh banyak kalangan miskin. Dengan demikian, beliau adalah penguasa pertama yang memperhatikan masalah sosial ini,

MEMERANGI RIBA

Ajaran Islam mewajibkan kita untuk segera melakukan perang terhadap riba. Kita harus segera melarang dan menghapuskan segala transaksi yang berbau riba. Rasulullah pernah bersabda,

"Ketahuilah bahwa semua riba telah dilarang. Sedang riba pertama yang aku mulai adalah riba pamanku; Abbas bin Abdul Muttalib."

Di masa lalu, para tokoh ***ishlah*** di kalangan umat enggan untuk menyebut ini sebagai masalah . Mereka khawatir akan muncul anggapan bahwa menghapuskan riba adalah sesuatu yang mustahil, sehingga ia menguasai gudang perekonomian dunia. Kini, pembahasan mengenai penghapusan riba menjadi ungkapan yang tidak punya arti penting. Padahal, pemerintah Rusia telah melarangnya dan menganggap riba sebagai suatu kejahatan keji di negerinya. Kita tidak boleh tertinggal dari Rusia dalam menerapkan ajaran Islam ini.

Jadi riba adalah haram ... dan haram ... haram ...! Umat dan negara-negara Islam harus menjadi orang pertama yang mengharamkannya.

PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Ruh Islam mengharuskan kita mengembangkan industri rumah tangga. Sekaligus, hal ini merupakan bentuk pertolongan pertama kepada keluarga-keluarga miskin, serta sebagai titik tolak menuju terbangunnya jiwa industri dan masyarakat industri...

Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mereka dan mendapat prioritas pertama adalah memintal dan menenun dengan peralatan sederhana, pembuatan sabun, pembuatan minyak wangi, dan masih banyak lagi jenis industri yang dapat dikerjakan oleh kaum

wanita, remaja putri, dan anak-anak. Dengan demikian mereka akan memperoleh keuntungan serta dapat menghindari penderitaan hidup dan meminta-minta.

Kita telah menyaksikan kenyataan ini sejak lama di wilayah Fawah Barat dan suku Adi Manfaluth serta di beberapa daerah di Mesir. Kita tahu, mereka mempunyai kekayaan material yang cukup dan kondisi perekonomian yang relatif stabil.

Sebenarnya, kementrian yang bersangkutan sudah pernah memikirkan proyek yang produktif ini, bahkan sudah menyediakan berbagai jenis alat tenun. Akan tetapi, kita tidak mengerti kelanjutannya hingga sekarang. Ada orang mengatakan bahwa "hari" dalam hitungan pemerintah adalah "tahun" bagi rakyatnya. Masalah ini masih dalam penantian terus-menerus.

MENGHEMAT KEBUTUHAN SEKUNDER DAN MEMPRIORITASKAN KEBUTUHAN PRIMER

Pemerintah harus memberi pengarahan kepada rakyat untuk tidak banyak menuruti kebutuhan hidup yang bersikap pelengkap (sekunder). Mereka dianjurkan agar memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat ***dharuri*** (pokok dan mendesak).

Dalam hal ini, hendaknya para pemimpin dapat menjadi teladan bagi anggota masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah harus segera melarang semua pesta gila-gilaan dan fenomena pemborosan harta benda. Tampilnya para pemimpin dengan sederhana, bersahaja, dan berwibawa di gedung-gedung, istana, dan acara resmi adalah sesuatu yang diajarkan oleh Islam yang hanif. Semua ini membutuhkan persiapan.

Semua ini merupakan kewajiban yang menuntut kita segera bangkit melaksanakannya.

Selamat bekerja!

Selanjutnya, dari sini kita mengetahui bahwa kita telah disuguhi sebuah sistem perekonomian yang tidak menggembirakan, baik secara teori maupun praktek. Sementara itu, ketidakjelasan dan kesemrawutan ini mendatangkan situasi sulit semakin mencekik leher rakyat.

Meskipun demikian, kita tidak bisa menyodorkan pemecahan yang spontan. Kita tidak akan menghadapi keadaan ini dengan menggunakan "obat-obat penenang" yang

justru mendatangkan bencana lebih parah lagi. Yang terpenting bagi kita sekarang ini ialah melihat semua permasalahan secara lebih luas dan menyeluruh. Kemudian, kita mengembalikan semuanya kepada asas yang kokoh, yang dapat dijadikan sandaran dan acuan utama dalam penyelesaiannya. Asas itu tidak lain adalah "sistem Islam" yang bersifat universal sekaligus rinci. Di dalamnya terdapat kebaikan yang nyata. Allah telah mengkaruniakan kepada kita potensi kemudahan ekonomi dan kesuksesan material yang tidak dikaruniakan-Nya kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Allah telah mengkaruniai kita berupa ikatan yang kuat, yakni: kesatuan bahasa, aqidah, kepentingan, serta sejarah antara kita dengan bangsa Arab dan Islam. Bangsa Arab dan Islam (alhamdulillah) merupakan wilayah yang terkaya di muka bumi, tersubur tanahnya, udaranya paling sejuk, paling banyak menyimpan kekayaan, dan paling banyak mengandung bahan pokok dan bahan mentah segala kebutuhan hidup.

Kesatuan ini —andaikan kita mau memanfaatkannya dengan baik— merupakan suatu jalan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya ia juga dapat menyelamatkan kita dari spekulasi Barat terhadap masalah ekspor dan impor kita.

Semua itu tidak banyak menuntut dari kita selain ***azam*** (tekad) yang kuat dan negara mengawali langkah: memperkuat hubungan, menjunjung tinggi persatuan, saling timbal balik mengirim utusan dan kelompok studi, berusaha keras dengan segenap potensi untuk membuat armada niaga, serta memasyarakatkan semangat persatuan dan kerja sama di kalangan bangsa Arab dan negara-negara Islam di dunia.

Bangsa Mesir telah lama bersabar menghadapi kehidupan yang keras seperti ini. Suatu penderitaan yang kelewat batas. Tidak seorang pun dapat menanggung penderitaan ini kecuali dengan bantuan mukjizat keimanan. Orang yang mengamati kehidupan petani, buruh, dan rakyat Mesir pada umumnya tentu terheran-heran dengan kemiskinan dan kesabaran yang disaksikannya.

Saya pernah benar-benar dipermalukan oleh salah seorang ikhwan dari India. la baru saja tiba dari Inggris. Setelah berkeliling sejenak di Kairo, ia berkomentar, "Semula saya menyangka bahwa berita yang disiarkan oleh surat-surat kabar Inggris tentang kemiskinan bangsa Mesir dan rendahnya taraf hidup mereka adalah propaganda untuk meruntuhkan nama baik Mesir di mata dunia. Namun setelah beberapa waktu saya mengunjungi desa-desa di Mesir, saya merasa sedih dengan apa yang saya saksikan."

Saya merasa malu dengan apa yang dikatakannya. Akan tetapi, saya berusaha untuk membela diri dan rakyat Mesir dengan mengatakan, "Tanyakan kepada semua surat kabar yang menyiarkan berita itu, bukankah penderitaan ini sebagai akibat dari kedhaliman penjajah?"

Untuk yang kedua kalinya saya merasakan sedih ketika seorang direktur sebuah perusahaan asing bertanya kepada saya, “Apakah kamu tega melihat kaum buruh yang melarat itu?" Namun saya dapat menjawabnya dengan, "Tidakkah anda ketahui bahwa kemiskinan ini disebabkan oleh kekikiran perusahaan-perusahaan dalam menggaji para buruh, walaupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya?"

Masalah ini harus benar-benar ditangani secara serius, bukan dengan main-main. Kondisi ini telah mencapai situasi yang kritis. Oleh sebab itu, harus dilakukan pengobatan dengan jitu. Untuk itu, kita tidak akan mendapatkan obat kecuali dengan "kedokteran Islam" yang hanif.

Wahai para pemimpin negara serta ketua-ketua lembaga dan organisasi... Wahai orang yang berpikir tentang ketenteraman dan kedamaian di tanah air ini...

Pahamilah masalah ini dengan cermat... Kembalilah? kepada sistem Islam...

Ya Allah, saksikanlah...

Sesungguhnya aku telah menyampaikan...

HASAN AL-BANNA